

MORAL DISENGAGEMENT SEBAGAI MEDIATOR ANTARA PERSEPSI KONTROL PERILAKU DAN NIAT KORUPSI PADA MAHASISWA SURABAYA

Lidia Aprilia Sari¹, Eben Ezer Nainggolan², Sayidah Aulia UI Haque³

Program Studi Psikologi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya^{1,2,3}

e-mail: aprilialid412@gmail.com^{1*}, ebenezer@untag-sby.ac.id^{2*},
sayidahaulia@untag-sby.ac.id^{3*}

ABSTRAK

Korupsi tetap menjadi permasalahan serius di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024 yang dirilis oleh Transparency International, di mana Indonesia memperoleh skor 37 dari 100 dan menempati peringkat ke-99 dari 180 negara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara perceived behavioral control (PBC) dan niat untuk melakukan korupsi, serta mengeksplorasi peran moral disengagement sebagai mediator. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan teknik convenience sampling, melibatkan 348 mahasiswa aktif dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Surabaya. Instrumen penelitian berupa skala terstandar yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya untuk mengukur PBC, niat korupsi, dan moral disengagement. Analisis data dilakukan menggunakan PROCESS Macro dari Hayes pada SPSS, meliputi uji outlier, normalitas residual, linearitas, one-sample t-test, dan analisis mediasi dengan teknik bootstrapping. Hasil menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara PBC dan niat korupsi ($\beta = 0,279$; $p < 0,001$), serta efek mediasi tidak langsung yang signifikan melalui moral disengagement ($\beta = 0,223$; $p < 0,000$; 95% CI [0,135–0,320]). Temuan ini mengindikasikan bahwa moral disengagement memainkan peran penting dalam menjembatani pengaruh PBC terhadap niat untuk melakukan korupsi, sehingga intervensi yang berfokus pada penguatan kesadaran moral menjadi krusial dalam upaya pendidikan antikorupsi.

Kata Kunci: *Perceived behavioral control; Intention to corruption; Moral disengagement; Mediasi; Mahasiswa.*

ABSTRACT

Corruption remains a serious issue in Indonesia, as reflected in the 2024 Corruption Perceptions Index (CPI) released by Transparency International, where Indonesia scored 37 out of 100 and ranked 99th out of 180 countries. This study aims to examine the relationship between perceived behavioral control (PBC) and the intention to engage in corruption, as well as to explore the mediating role of moral disengagement. A quantitative approach was employed using convenience sampling, involving 348 active students from public and private universities in Surabaya. The instruments used were standardized scales that had been tested for validity and reliability to measure PBC, corruption intention, and moral disengagement. Data analysis was conducted using Hayes' PROCESS Macro in SPSS, including outlier testing, residual normality, linearity, one-sample t-tests, and mediation analysis through bootstrapping. The results revealed a significant positive relationship between PBC and corruption intention ($\beta = 0.279$; $p < 0.001$), as well as a significant indirect effect through moral disengagement ($\beta = 0.223$; $p < 0.000$; 95% CI [0.135–0.320]). These findings indicate that moral disengagement plays a crucial role in mediating the effect of PBC on the intention to engage in corruption, highlighting the importance of moral awareness enhancement in anti-corruption education efforts.

Keywords: *Perceived behavioral control; Intention to corruption; Moral disengagement; Mediation; Students.*

PENDAHULUAN

Korupsi tetap menjadi salah satu persoalan sistemik dan paling serius yang secara konsisten menghambat kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Permasalahan ini bukan hanya sekadar persepsi, melainkan sebuah realitas yang terukur secara empiris. Berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2024 yang dirilis oleh Transparency International, Indonesia mencatat skor 37 dari skala 100 dan menempati peringkat ke-99 dari 180 negara yang disurvei. Skor yang stagnan di level rendah ini menjadi sebuah indikator yang mengkhawatirkan bahwa korupsi masih menjadi masalah yang bersifat kronis dan mengakar kuat dalam berbagai sendi kehidupan bangsa (Nugroho et al., 2023; Rosmadewi et al., 2024). Fenomena yang lebih meresahkan adalah fakta bahwa praktik-praktik koruptif ini tidak lagi hanya terbatas pada sistem pemerintahan atau dunia bisnis, tetapi juga telah merambah dan menyusup secara subtil ke dalam institusi-institusi yang seharusnya menjadi benteng moral, termasuk dunia pendidikan tinggi, yang mengancam integritas generasi masa depan (Thohir, 2020).

Secara ideal, institusi pendidikan tinggi diharapkan dapat berfungsi sebagai kawah candradimuka, tempat di mana para calon pemimpin dan intelektual bangsa tidak hanya ditempa secara akademis, tetapi juga dibentuk karakternya. Universitas seharusnya menjadi sebuah benteng pertahanan terakhir bagi nilai-nilai integritas, kejujuran, dan etika. Dalam ekosistem yang ideal ini, seluruh sivitas akademika, terutama mahasiswa, menjunjung tinggi kehormatan akademik dan menolak segala bentuk tindakan yang mencederai prinsip-prinsip tersebut. Lulusan yang dihasilkan dari sistem seperti ini adalah individu-individu yang tidak hanya kompeten di bidangnya, tetapi juga memiliki kompas moral yang kokoh, yang siap menjadi agen perubahan dan garda terdepan dalam gerakan anti-korupsi di tengah masyarakat. Visi luhur inilah yang menjadi landasan filosofis bagi peran sentral perguruan tinggi dalam upaya jangka panjang membangun sebuah peradaban bangsa yang bebas dari korupsi (Hudiarini, 2021; Rosmadewi et al., 2024).

Namun, realitas di lapangan seringkali menampilkan sebuah gambaran yang paradoksal dan bertentangan dengan visi ideal tersebut. Fenomena *korupsi akademik* telah menjadi sebuah rahasia umum yang menggerogoti integritas dunia pendidikan tinggi. Praktik-praktik seperti plagiarisme dalam penyusunan karya ilmiah, mencontek saat ujian, melakukan titip absen, hingga penyalahgunaan dana beasiswa merupakan beberapa contoh nyata dari bentuk *korupsi akademik* yang umum terjadi. Adanya kesenjangan yang lebar antara nilai-nilai integritas yang secara formal diajarkan dengan kenyataan perilaku menyimpang di lapangan ini menunjukkan adanya pelemahan kesadaran etis di kalangan mahasiswa. Kondisi ini menjadi sangat berbahaya karena perilaku koruptif dalam skala kecil yang dinormalisasi di lingkungan kampus berpotensi menjadi cikal bakal dari perilaku korupsi dalam skala yang jauh lebih besar ketika mereka kelak memasuki dunia kerja dan memegang jabatan publik (Hartanto et al., 2025; Yunita et al., 2024).

Untuk dapat memahami mengapa seorang mahasiswa, yang secara kognitif mengetahui bahwa suatu tindakan itu salah, pada akhirnya tetap membentuk niat untuk melakukannya, kita dapat merujuk pada kerangka kerja teoretis yang kuat, yaitu *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang dikembangkan oleh Ajzen. Teori ini menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan sebuah perilaku merupakan prediktor terdekat dari perilaku itu sendiri. Niat ini, pada gilirannya, dibentuk oleh tiga komponen psikologis utama: sikap terhadap perilaku (evaluasi positif atau negatif), norma subjektif (persepsi terhadap tekanan sosial), dan yang sangat relevan dalam konteks ini adalah *perceived behavioral control (PBC)*. *PBC* merujuk pada persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu tindakan. Komponen ini menjadi sangat penting dalam menjelaskan perilaku menyimpang,

karena ia menggambarkan sejauh mana seorang individu merasa memiliki kemampuan, sumber daya, dan kendali untuk berhasil melakukan atau menghindari suatu tindakan (Maranata & Wijaya, 2021; Meyda & Wijayanti, 2025).

Dalam konteks perilaku *korupsi akademik*, *perceived behavioral control (PBC)* memegang peranan yang sangat penting. Seorang mahasiswa yang memiliki tingkat *PBC* yang tinggi terhadap perilaku menyimpang seperti mencontek atau memanipulasi data, cenderung merasa bahwa ia memiliki kapabilitas dan otonomi untuk melakukan tindakan tersebut tanpa akan menghadapi hambatan yang berarti. Persepsi ini bisa muncul dari keyakinan bahwa ia cukup pintar untuk tidak ketahuan, bahwa sistem pengawasan di kampusnya lemah, atau bahwa sanksi yang ada tidak cukup berat untuk menimbulkan efek jera. Rasa kontrol yang tinggi ini dapat secara signifikan memperkuat *intensi korupsi* atau niat untuk terlibat dalam tindakan tidak etis, terutama ketika perilaku tersebut dianggap sebagai sebuah cara yang "aman" dan berisiko rendah untuk mencapai tujuan-tujuan akademis yang diinginkan, seperti mendapatkan nilai yang tinggi (Bustan & Mailani, 2022).

Namun, hubungan antara rasa mampu melakukan tindakan salah (*PBC*) dengan niat untuk melakukannya seringkali tidak bersifat langsung. Sebagian besar mahasiswa pada dasarnya masih memiliki standar moral internal yang akan menimbulkan perasaan bersalah jika dilanggar. Di sinilah sebuah mekanisme psikologis lain yang sangat penting berperan, yaitu *moral disengagement* atau pelepasan tanggung jawab moral. Konsep yang dikembangkan oleh Bandura ini menjelaskan bahwa individu memiliki kemampuan untuk menonaktifkan standar moral internal mereka melalui serangkaian mekanisme kognitif atau rasionalisasi. Mekanisme ini memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai moralnya tanpa harus merasakan sanksi internal berupa rasa bersalah. Seperti yang ditunjukkan oleh Hayati (2020), *moral disengagement* berkorelasi positif dengan niat untuk melakukan plagiarisme, membuktikan perannya sebagai "izin" psikologis untuk berperilaku tidak etis.

Meskipun telah ada berbagai penelitian sebelumnya yang mendukung peran *PBC* dalam membentuk berbagai niat, seperti niat untuk melakukan *whistleblowing* atau sikap anti-korupsi (Ningsih et al., 2024; Utami et al., 2018; Zulaikha et al., 2021), masih terdapat sebuah celah penelitian (*research gap*) yang signifikan. Sebagian besar studi tersebut belum secara spesifik meneliti hubungan langsung antara *PBC* dengan *intensi korupsi* di kalangan mahasiswa. Lebih penting lagi, masih sangat sedikit penelitian yang mempertimbangkan peran dari *moral disengagement* sebagai sebuah variabel mediasi dalam hubungan tersebut. Dengan kata lain, belum banyak yang mengkaji bagaimana rasa kontrol (*PBC*) dapat memicu proses rasionalisasi (*moral disengagement*), yang kemudian pada akhirnya akan membentuk niat untuk melakukan korupsi. Kekosongan dalam model penjelasan yang terintegrasi inilah yang menjadi justifikasi utama dari penelitian ini.

Nilai kebaruan dan inovasi utama dari penelitian ini terletak pada pengujian sebuah model mediasi yang spesifik dan terintegrasi untuk menjelaskan proses terbentuknya *intensi korupsi akademik*. Berdasarkan celah penelitian yang telah diidentifikasi, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara *perceived behavioral control* dan *intensi korupsi* pada mahasiswa, dengan secara spesifik mengeksplorasi peran mediasi dari *moral disengagement* dalam hubungan tersebut. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi ganda yang signifikan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas penerapan *Theory of Planned Behavior* dalam konteks perilaku koruptif dengan mengintegrasikan mekanisme *moral disengagement*. Secara praktis, temuan dari penelitian ini dapat menjadi landasan ilmiah yang kuat bagi perancangan strategi intervensi dan pendidikan anti-korupsi yang lebih efektif di lingkungan perguruan tinggi, yang tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga pada penguatan kesadaran moral mahasiswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang menerapkan desain korelasional. Tujuan utama dari desain ini adalah untuk menguji secara statistik model hubungan antarvariabel, di mana secara spesifik penelitian ini mengkaji peran mediasi dari *moral disengagement* dalam hubungan antara *perceived behavioral control* (PBC) dan intensi untuk melakukan korupsi (*intention to corruption*). Partisipan dalam penelitian ini adalah 348 mahasiswa aktif yang berasal dari berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang berlokasi di Kota Surabaya. Proses penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *convenience sampling*, sebuah metode non-probabilitas di mana pemilihan partisipan didasarkan pada kemudahan akses dan ketersediaan mereka untuk mengisi kuesioner penelitian. Teknik ini dipilih karena efisiensinya dalam menjangkau populasi mahasiswa yang luas dan tersebar di berbagai institusi pendidikan dalam rentang waktu yang telah ditentukan oleh peneliti.

Proses pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan platform Google Forms. Instrumen yang digunakan adalah satu set kuesioner yang terdiri dari tiga skala psikologis terpisah yang telah terstandar. Ketiga skala tersebut adalah skala *Perceived Behavioral Control* (PBC), skala *Intention to Corruption*, dan skala *Moral Disengagement*. Sebelum digunakan untuk pengumpulan data utama, seluruh instrumen telah melalui proses pengujian untuk memastikan kualitas psikometriknya. Uji validitas dilakukan dengan menerapkan analisis diskriminasi item untuk memastikan setiap butir pernyataan mengukur konstruk yang tepat, sementara uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung koefisien *Cronbach's Alpha* yang menunjukkan hasil reliabilitas yang baik. Prosedur etis dijaga dengan ketat, di mana sebelum mengisi kuesioner, setiap partisipan diwajibkan untuk membaca dan menyetujui lembar *informed consent* yang menjamin kerahasiaan data dan sifat kesukarelaan partisipasi.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Sebelum melakukan uji hipotesis utama, data yang terkumpul terlebih dahulu melewati serangkaian uji prasyarat untuk memastikan kelayakannya. Uji prasyarat tersebut meliputi deteksi dan penanganan *outlier*, uji normalitas residual untuk memeriksa sebaran data, serta uji linearitas untuk memastikan adanya hubungan linear antarvariabel. Selain itu, dilakukan pula uji *one-sample t-test* sebagai analisis deskriptif tambahan untuk membandingkan rata-rata skor variabel terhadap nilai tertentu. Untuk menguji hipotesis mediasi, penelitian ini menggunakan teknik analisis mediasi dengan metode *bootstrapping*. Pendekatan statistik modern ini dipilih karena kemampuannya yang robust dalam menguji signifikansi hubungan langsung dan tidak langsung antarvariabel. Prosedur ini secara spesifik bertujuan untuk menentukan apakah *moral disengagement* secara signifikan berperan sebagai mediator dalam hubungan antara *perceived behavioral control* dan *intention to corruption*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini melibatkan 348 mahasiswa aktif dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Surabaya. Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui Google Form, dengan metode *convenience sampling*. Sebelum mengisi kuesioner, partisipan diberikan lembar persetujuan sebagai bentuk *informed consent*, dan hanya yang menyatakan bersedia yang dapat melanjutkan pengisian.

Sebelum melakukan analisis mediasi, dilakukan sejumlah uji prasyarat untuk memastikan kelayakan data. Uji Outlier dilakukan dengan boxplot pada masing-masing

variabel (perceived behavioral control, moral disengagement, dan intention to corruption). Hasil menunjukkan tidak ada data yang teridentifikasi sebagai outlier, ditandai dengan tidak munculnya simbol O atau * di luar batas boxplot. Uji Normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov terhadap residual. Pada model pertama perceived behavioral control dan intention to corruption, nilai signifikansi sebesar 0,200 ($p > 0,05$) menunjukkan residual berdistribusi normal. Pada model kedua perceived behavioral control dan intention to corruption dengan mediator moral disengagement, nilai signifikansi 0,007 ($p < 0,05$) menunjukkan pelanggaran normalitas secara formal, namun inspeksi visual (QQ plot, histogram, stem-and-leaf) menunjukkan distribusi residual masih dapat diterima karena sebaran mendekati normal. Uji Linearitas dilakukan melalui scatter plot antar variabel yaitu perceived behavioral control dan intention to corruption, perceived behavioral control dan moral disengagement, moral disengagement dan intention to corruption. Pola sebar titik menunjukkan distribusi acak tanpa pola sistematis, yang menandakan hubungan linier antar variabel telah terpenuhi.

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan PROCESS Macro Model 4 dengan 5000 bootstrapping. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa perceived behavioral control berpengaruh signifikan terhadap intention to corruption ($\beta = 0,279$, $p < 0,001$, CI: 0,157–0,401). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi perceived behavioral control, maka semakin tinggi pula niat untuk melakukan tindakan korupsi. H1 diterima. Berdasarkan hasil mediasi, moral disengagement terbukti memediasi sepenuhnya hubungan antara perceived behavioral control dan intention to corruption. Karena direct effect menjadi tidak signifikan setelah mediator dimasukkan, maka dapat disimpulkan terjadi mediasi penuh (full mediation) H2 diterima. Lihat tabel 1.

Tabel 1. Tabel Analisis Mediasi

Jalur	Koefisien (β)	SE	t	p	Confidence Interval (CI)		Keterangan
					LLCI	ULCI	
Total Effect							
XT2 → XTY	0,279	0,062	4,489	<0,001	0,157	0,401	Signifikan
Direct Effect							
XT2 → XTY (kontrol XTZ)	0,056	0,054	1,043	0,298	-0,050	0,163	Tidak signifikan
Indirect Effect							
XT2 → XTZ → XTY	0,223	0,046	—	—	0,135	0,320	Signifikan

Selain itu, dilakukan analisis one sample t-test untuk melihat kecenderungan skor pada masing-masing variabel (lihat Tabel 2). Uji one-sample t-test dilakukan untuk mengetahui kecenderungan skor rata-rata pada masing-masing variabel dengan membandingkan nilai empiris dengan nilai rata-rata hipotetik. Hasil analisis menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat perceived behavioral control yang tinggi dalam pengambilan keputusan, yang mencerminkan keyakinan diri dan persepsi kontrol yang kuat terhadap perilaku mereka. Selain itu, mahasiswa juga menunjukkan kecenderungan tinggi dalam melakukan pelepasan moral (moral disengagement), yang berarti mereka cenderung mampu menonaktifkan standar moralnya dalam kondisi tertentu. Sementara itu, tingkat intention to corruption berada pada kategori sedang, yang mengindikasikan bahwa sebagian mahasiswa menunjukkan potensi niat untuk melakukan tindakan koruptif dalam situasi akademik.

Tabel 2. Uji One Sample T-Test

Skala	Mean Hipotetik	Mean Empirik	t	p	Kategori mean empiris
<i>Intention to Corruption</i>	27,071	26,721	-1,061	0,290	Sedang
<i>Perceived Behavioral Control</i>	25,371	31,797	22,591	0,000	Tinggi
<i>Moral Disengagement</i>	56,901	64,136	14,400	0,000	Tinggi

Pembahasan

Pembahasan ini mengkaji secara mendalam temuan penelitian mengenai hubungan antara *perceived behavioral control* (PBC) dan niat melakukan korupsi (*intention to corruption*), serta peran mediasi dari pelepasan moral (*moral disengagement*) di kalangan mahasiswa. Temuan utama yang paling signifikan dan menantang adalah adanya pengaruh positif dan langsung dari PBC terhadap niat korupsi. Hal ini secara sekilas tampak berlawanan dengan asumsi umum bahwa individu dengan kontrol diri yang tinggi cenderung berperilaku etis. Namun, temuan ini menjadi lebih jelas ketika dianalisis melalui peran mediasi penuh dari *moral disengagement*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBC tidak secara langsung mendorong niat korupsi, melainkan efeknya tersalurkan sepenuhnya melalui proses kognitif di mana mahasiswa terlebih dahulu menonaktifkan standar moral internal mereka. Dengan demikian, diskusi ini akan berfokus pada dekonstruksi mekanisme psikologis ini: bagaimana persepsi atas kemampuan dan kontrol diri menjadi pemicu bagi justifikasi moral, yang pada akhirnya membentuk niat untuk berperilaku koruptif.

Temuan bahwa *perceived behavioral control* berpengaruh positif terhadap niat korupsi sejalan dengan kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), namun dengan interpretasi yang spesifik pada konteks perilaku antisosial. Dalam TPB, PBC merujuk pada persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku. Dalam kasus ini, mahasiswa dengan PBC yang tinggi adalah mereka yang merasa bahwa tindakan koruptif di lingkungan akademik—seperti mencontek, plagiarisme, atau titip absen—dapat dilakukan dengan mudah, memiliki hambatan yang minim, dan risiko tertangkap yang rendah. Hasil uji *one-sample t-test* yang menunjukkan tingginya tingkat PBC pada sampel penelitian ini mengkonfirmasi bahwa persepsi ini sangat lazim. Keyakinan bahwa mereka memiliki kapasitas dan otonomi untuk melakukan pelanggaran tanpa konsekuensi signifikan inilah yang menjadi langkah pertama dalam pembentukan niat, sejalan dengan penelitian oleh Utami et al. (2018) dan Zulaikha et al. (2021) yang juga mengaitkan persepsi kontrol dengan intensi perilaku.

Peran sentral dalam penelitian ini dipegang oleh *moral disengagement* sebagai mediator penuh. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan langsung antara PBC dan niat korupsi menjadi tidak signifikan setelah *moral disengagement* dimasukkan ke dalam model. Ini mengimplikasikan sebuah jalur kausal psikologis yang jelas: PBC tidak secara otomatis menyebabkan niat korupsi. Sebaliknya, persepsi kontrol yang tinggi tampaknya berfungsi sebagai "pemberi izin" atau pemicu yang mengaktifkan mekanisme *moral disengagement*. Ketika seorang mahasiswa merasa 'bisa' melakukan tindakan koruptif (PBC tinggi), ia kemudian terlibat dalam proses justifikasi diri untuk membuat tindakan tersebut terasa 'benar' atau setidaknya 'dapat diterima'. Proses ini, sebagaimana dijelaskan oleh Hyatt (2017), melibatkan berbagai manuver kognitif seperti meminimalisir dampak negatif, menyalahkan pihak lain, atau menggunakan bahasa *eufemisme* untuk menyamarkan pelanggaran, yang pada akhirnya menetralkan rasa bersalah dan membuka jalan bagi pembentukan niat.

Tingginya kecenderungan *moral disengagement* yang ditemukan pada sampel mahasiswa melalui uji *one-sample t-test* memberikan konteks yang krusial bagi temuan mediasi. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa dalam penelitian ini tidak hanya merasa mampu melakukan tindakan koruptif, tetapi juga memiliki kapasitas kognitif yang terlatih untuk merasionalisasi tindakan tersebut. Lingkungan akademik yang kompetitif dan berorientasi pada nilai dapat menjadi lahan subur bagi berkembangnya justifikasi-justifikasi moral. Tekanan untuk mendapatkan nilai tinggi dapat mendorong mahasiswa untuk menggunakan pembenaran seperti "ini hanya untuk membantu teman" atau "sistemnya yang tidak adil". Temuan ini selaras dengan penelitian Hayati (2020) yang menemukan hubungan positif antara *moral disengagement* dengan niat melakukan plagiarisme. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme pelepasan moral bukanlah fenomena yang jarang, melainkan strategi koping kognitif yang umum digunakan oleh mahasiswa untuk menavigasi dilema etis dalam kehidupan akademik mereka (D'Silva et al., 2015; San et al., 2023).

Secara sintesis, penelitian ini melukiskan sebuah rantai proses psikologis yang terstruktur: dari persepsi kapabilitas menuju justifikasi moral, dan akhirnya pada pembentukan niat. Proses ini dimulai ketika seorang mahasiswa menilai sebuah situasi dan menyimpulkan bahwa ia memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melakukan tindakan koruptif dengan risiko minimal (PBC tinggi). Keyakinan ini tidak langsung diterjemahkan menjadi niat. Sebaliknya, ia memicu proses internal di mana mahasiswa mengkonstruksi alasan-alasan yang membuat perilaku tersebut dapat diterima secara moral, misalnya dengan menganggapnya sebagai pelanggaran sepele atau sebagai respons yang wajar terhadap tekanan eksternal (*moral disengagement* tinggi). Hanya setelah proses pembenaran diri ini berhasil menonaktifkan standar moral internalnya, niat untuk melakukan tindakan korupsi (*intention to corruption*) terbentuk secara solid. Rantai proses inilah yang menjelaskan mengapa *moral disengagement* mampu memediasi hubungan antara PBC dan niat korupsi secara penuh (Nugroho, 2020; Zhao et al., 2017).

Implikasi utama dari temuan ini menuntut adanya pergeseran paradigma fundamental dalam perancangan program pendidikan dan prevensi anti-korupsi di tingkat perguruan tinggi. Hasil penelitian secara tegas mengindikasikan bahwa intervensi konvensional yang hanya berfokus pada penguatan kontrol diri atau penekanan sanksi untuk menurunkan *perceived behavioral control* (PBC) terbukti tidak memadai. Pendekatan semacam itu hanya menyentuh permukaan perilaku tanpa mengatasi akar masalahnya, yaitu proses kognitif internal yang membenarkan tindakan tidak etis. Akar masalah sesungguhnya terletak pada mekanisme *moral disengagement*, sebuah "senjata" psikologis yang memungkinkan individu untuk melanggar standar moral pribadinya tanpa merasa bersalah. Oleh karena itu, setiap upaya pencegahan yang efektif harus secara langsung menargetkan dan membongkar mekanisme pembenaran diri ini. Upaya ini harus beralih dari sekadar memberitahu "apa yang salah" menjadi melatih mahasiswa untuk memahami "mengapa mereka tergoda untuk melakukan yang salah" dan bagaimana pikiran mereka menipu nuraninya sendiri. Fokusnya harus pada dekonstruksi rasionalisasi yang berbahaya tersebut.

Dengan memahami bahwa *moral disengagement* adalah target utamanya, maka strategi intervensi anti-korupsi harus dirancang secara lebih pedagogis dan introspektif. Program pendidikan perlu secara aktif melatih mahasiswa untuk mengenali, menantang, dan menolak berbagai bentuk rasionalisasi yang sering mereka gunakan untuk membenarkan kecurangan. Metode ini dapat diimplementasikan melalui analisis studi kasus dilema etis yang relevan dengan kehidupan mereka, memaksa mereka untuk berdebat dan mempertahankan posisi moralnya. Selain itu, latihan berbasis empati seperti menayangkan dampak nyata korupsi terhadap korban sangat krusial untuk menutup jarak emosional dan membuat konsekuensi

perbuatan terasa lebih personal. Sebagaimana ditekankan oleh Asrofi et al. (2025) dan Lau (2021), promosi integritas akademik sebagai nilai inti institusi juga sangat penting. Tujuannya adalah membangun "sistem kekebalan moral" yang kuat pada diri mahasiswa, sehingga mereka memiliki resiliensi psikologis untuk menolak godaan menonaktifkan hati nuraninya saat dihadapkan pada kesempatan berbuat curang atau korupsi di masa depan.

Meskipun memberikan wawasan penting, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, penggunaan metode *convenience sampling* membatasi kemampuan untuk menggeneralisasi temuan ini ke seluruh populasi mahasiswa di Indonesia. Kedua, desain penelitian yang bersifat *cross-sectional* hanya dapat mengidentifikasi hubungan dan model mediasi, namun tidak dapat membuktikan hubungan sebab-akibat secara definitif. Ketiga, seluruh data dikumpulkan melalui metode laporan diri (*self-report*), yang rentan terhadap bias keinginan sosial (*social desirability bias*), di mana responden mungkin cenderung menjawab dengan cara yang dianggap baik secara sosial. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan desain *longitudinal* untuk mengamati bagaimana PBC dan *moral disengagement* berkembang seiring waktu dan memengaruhi perilaku aktual. Studi eksperimental juga dapat dirancang untuk memanipulasi variabel-variabel ini guna menguji hubungan kausal secara lebih kuat.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap sebuah mekanisme psikologis yang signifikan di balik niat korupsi di kalangan mahasiswa, di mana *perceived behavioral control* (PBC) atau persepsi atas kemampuan diri untuk berbuat korupsi secara positif memprediksi niat tersebut. Temuan yang tampak berlawanan dengan intuisi ini menjadi jelas ketika dianalisis lebih lanjut. Hubungan ini ternyata tidak bersifat langsung, melainkan dimediasi secara penuh oleh pelepasan moral (*moral disengagement*). Ini berarti, keyakinan seorang mahasiswa bahwa ia dapat dengan mudah melakukan tindakan koruptif seperti mencontek atau plagiarisme dengan risiko tertangkap yang rendah (PBC tinggi) tidak secara otomatis mendorong niat. Sebaliknya, persepsi kontrol yang tinggi ini berfungsi sebagai "pemberi izin" yang memicu proses kognitif selanjutnya, yaitu justifikasi diri, sebelum niat korupsi benar-benar terbentuk secara solid.

Peran sentral pelepasan moral sebagai mediator penuh menjelaskan jalur kausal psikologis yang terjadi. Ketika mahasiswa merasa 'bisa' melakukan tindakan koruptif, ia kemudian terlibat dalam serangkaian manuver kognitif untuk menonaktifkan standar moral internalnya. Proses ini melibatkan rasionalisasi seperti meminimalkan dampak negatif, menyalahkan sistem, atau menggunakan bahasa eufemisme untuk menyamarkan pelanggaran. Hanya setelah proses pembenaran diri ini berhasil menetralkan rasa bersalah, niat untuk berbuat korupsi dapat terbentuk. Tingginya kecenderungan pelepasan moral yang ditemukan pada sampel penelitian menunjukkan bahwa ini adalah strategi koping kognitif yang umum digunakan mahasiswa untuk menavigasi dilema etis. Mekanisme inilah yang menjelaskan mengapa hubungan antara persepsi kontrol dan niat korupsi menjadi tidak signifikan setelah pelepasan moral dimasukkan ke dalam model analisis.

Implikasi dari temuan ini sangat signifikan bagi perancangan program pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi. Intervensi yang hanya berfokus pada peningkatan sanksi untuk menurunkan PBC tidak akan cukup efektif, karena akar masalahnya terletak pada proses kognitif yang membenarkan perilaku tidak etis. Oleh karena itu, program yang efektif harus secara eksplisit menargetkan dan membongkar mekanisme pelepasan moral, misalnya melalui studi kasus dilema etis dan latihan empati untuk memperkuat "sistem kekebalan moral" mahasiswa. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena desainnya yang *cross-sectional* dan penggunaan metode laporan diri. Penelitian selanjutnya disarankan

menggunakan desain longitudinal atau eksperimental untuk menguji hubungan kausal secara lebih kuat dan memvalidasi temuan ini pada populasi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrofi, A., et al. (2025). Ihwal pendidikan di era modern: Pendidikan karakter dan pembelajaran di era industri. *LEARNING Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(2), 486. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i2.4858>
- Bustan, R., & Mailani, L. (2022). Effectiveness of anti-corruption counseling with psycho-religious approach to develop student integrity character. *Integritas Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 135. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.896>
- D'Silva, J. L., et al. (2015). Personal moral philosophy of undergraduates towards academic dishonesty. *Modern Applied Science*, 9(11), 144. <https://doi.org/10.5539/mas.v9n11p144>
- Hartanto, R., et al. (2025). Revealing perceptions of corruption behavior in Indonesian higher education institutions. *Multidisciplinary Science Journal*, 7(8), 2025390. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2025390>
- Hayati, N., & Nuqul, F. L. (2020). Pengaruh spiritualitas dan HEXACO personality terhadap intensitas perilaku korupsi pada mahasiswa. *Jurnal Psikogenesis*, 5(2), 32–44.
- Hudiarini, S. (2021). Preventive measures for corruption through anti-corruption education at higher education institution (A case study at State Polytechnic of Malang). *Journal of Law Policy and Globalization*. <https://doi.org/10.7176/jlpg/105-11>
- Hyatt, J. (2017). Recognizing moral disengagement and its impact on patient safety. *Journal of Nursing Regulation*, 7(4), 15. [https://doi.org/10.1016/s2155-8256\(17\)30015-7](https://doi.org/10.1016/s2155-8256(17)30015-7)
- Lau, P. (2021). A case study on research postgraduate students' understanding of academic integrity at a Hong Kong University. *Frontiers in Education*, 6. <https://doi.org/10.3389/feduc.2021.647626>
- Maranata, B. H., & Wijaya, T. M. (2021). Pengaruh subjective norms, perceived behavior control, attitude terhadap intensi mahasiswa menjadi wirausaha. *Applied Research in Management and Business*, 1(2), 54. <https://doi.org/10.53416/arimbi.v1i2.43>
- Meyda, R., & Wijayanti, L. A. (2025). Hubungan self efficacy ibu dengan pemberian ASI eksklusif. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 152. <https://doi.org/10.51878/social.v5i1.4691>
- Ningsih, N., et al. (2024). The impact of attitude, subjective norms, perceived behavioral control, and organizational commitment on whistleblowing intention: A moderating role of local culture. *Public and Municipal Finance*, 22(3), 606.
- Nugroho, K. S. (2020). Perilaku korupsi di Indonesia: Tinjauan teoritik model MARS. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 4(2). <https://doi.org/10.31506/jipags.v4i2.8219>
- Nugroho, Y. A., et al. (2023). Employee professional improvement model civil state in resource staff work units state police human power Republic of Indonesia. *Kontigensi Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11(1), 95. <https://doi.org/10.56457/jimk.v11i1.326>
- Rosmadewi, R., et al. (2024). Pengetahuan, sikap dan perilaku antikorupsipada mahasiswa. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(4), 421. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i4.3364>
- San, S., et al. (2023). An investigation of academic dishonesty among undergraduates in four universities in Laos: Critical analysis of students' final reports. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 6(3). <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i3-05>

- Sofia, A. I., & Herdiansyah, H. (2011). Penelitian pengaruh attitude toward behavior, subjective norm, dan perceived behavioral control terhadap intensi perilaku anti-korupsi pada mahasiswa peserta matakuliah anti-korupsi Universitas Paramadina. *Jurnal Universitas Paramadina*.
- Thohir, Y. (2020). Aktivitas budaya sekolah berbasis karakter Ikhwanul Muslimin (Studi etnografi pada SIT Bina Ilmi Palembang). *Tadrib Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(2), 126. <https://doi.org/10.19109/tadrib.v6i2.5672>
- Utami, I. G. A. E. P., et al. (2018). The effect of attitude toward the behavior, subjective norm and perceived behavioral control on whistleblowing intention. *International Journal of Contemporary Accounting*, 1(2), 71–87. <https://doi.org/10.25105/ijca.v1i2.3930>
- Yunita, S., et al. (2024). The influence of hazardous food chemical use on community welfare from the perspective of Unimed students. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(4), 465. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i4.3466>
- Zhao, H., et al. (2017). Effects of perceived descriptive norms on corrupt intention: The mediating role of moral disengagement. *International Journal of Psychology*, 54(1), 93. <https://doi.org/10.1002/ijop.12401>
- Zulaikha, et al. (2021). Effect of attitudes, subjective norms and behavioral controls on the intention and corrupt behavior in public procurement: Fraud triangle and the planned behavior in management accounting. *[Nama Jurnal Tidak Diketahui]*, 7(2), 331–338.